

## **MEMBANGUN KEPASTIAN INFORMASI MENGENAI PENYUSUNAN ANGGARAN SATKER DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE NTB MELALUI RAPAT DAN SOSIALISASI KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 60 TAHUN 2022 MENUJU PEMILU YANG AKAN DATANG**

Pasca hari ditetapkannya DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022, KPU Kabupaten Lombok Timur atau mungkin KPU Daerah lainnya, menghadapi situasi ketidak pastian aspek anggaran kegiatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satkernya.

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan pada tahun 2022 terdapat agenda tahapan Pemilu yang sangat signifikan untuk dilakukan yaitu menyangkut sosialisasi, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai politik Calon Peserta Pemilu serta kegiatan terkait lainnya. Tentu untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tersebut, memerlukan dukungan dari segi aspek anggaran.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pada hari kamis tanggal 31 Maret 2022 dilaksanakan rapat dan sosialisasi Keputusan Nomor 60 Tahun 2022 melalui *Online Meeting* via aplikasi Zoom. Rapat dilaksanakan sesuai undangan Sekretaris KPU Provinsi NTB Nomor 254/PR.03-Und/52/2022, dan dibuka oleh Sekretaris Provinsi NTB. Dalam kesempatan rapat tersebut juga hadir unsur Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretaris Jenderal KPU RI sekaligus sebagai pembicara utama, serta diikuti oleh para Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi NTB, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Beberapa poin penting dari pelaksanaan sosialisasi tersebut antara lain :

1. dengan terbitnya Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022, Satker harus menguraikan RKA K/L terutama pagu anggaran pada akun-akun kegiatan yang memang harus di *breakdown* ,dan memberikan wewenang yang lebih luas kepada Kuasa Penggunaan Anggaran dalam mem *breakdown* dan mendetilkan pagu pada akun 6709 dan 6710 menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan tahapan pemilu Tahun 2022.
2. Terhadap adanya *keluhan* mengenai kekurangan sarana prasarana berupa gudang pengelolaan logistik Pemilu yang sangat penting keberadaanya, dari Unsur Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI menyatakan bahwa RKBMN berupa bangunan negara yang disetujui saat ini hanya berupa Gedung, sedangkan untuk pengadaan bangunan gudang pengelolaan logistik Pemilu, KPU menyiapkan pagu anggaran sewa untuk Tahun 2023, 2024 dan 2025.

Dari pemaparan Unsur Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI pada bagian lainnya, diperoleh informasi bahwa saat ini sedang dilakukan proses revisi DIPA pada level DJA. Sedangkan dari tanggapan Sekretaris KPU Provinsi NTB diperoleh informasi bahwa setelah data dan informasi hasil revisi DIPA pada level DJA tersebut diterima oleh KPU Provinsi NTB maka selanjutnya akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama seluruh Satker KPU Kabupaten/Kota se NTB sehingga susunan anggaran Satker KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB *in line* dengan Satker KPU Provinsi NTB. Semoga.

*(Tim pengelola jdih. kpu.go.id/ntb/lotim)*

